



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN
INFORMASI BERMUATAN PERJUDIAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK OLEH POLDA RIAU**

TESIS

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum*

OLEH:

**MUHAMMAD JORDY PRAMMULIA
NIM: 2320112033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN
INFORMASI BERMUATAN PERJUDIAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK OLEH POLDA RIAU**



DOSEN PEMBIMBING

1. Prof. Dr. ISMANSYAH S.H., M.H.
2. Dr. NANI MULYATI S.H., M.CL

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI BERMUATAN PERJUDIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH POLDA RIAU

(Muhammad Jordy Prammulia, 2320112033, Fakultas Hukum Program Pasca

Sarjana Universitas Andalas, Magister Ilmu Hukum, hlm 105, 2025)

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi bermuatan perjudian *online* menjadi perhatian serius bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menanggulangi kejahatan siber. Namun, implementasi penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi perjudian berdasarkan UU ITE oleh Polda Riau beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Penelitian ini juga menjelaskan dan menganalisis perhitungan *cost and benefit* penegakan hukum terhadap penyebaran informasi perjudian, khususnya terkait biaya perkara dan hasil penindakan yang diperoleh pada periode Q1 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik dan pejabat terkait di Polda Riau, observasi lapangan terhadap proses penegakan hukum, serta analisis dokumen perkara. Data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, laporan kepolisian, data statistik penindakan, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE terhadap penyebaran informasi perjudian oleh Polda Riau telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian khusus *cyber crime*, kompleksitas teknologi yang digunakan pelaku, serta tantangan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Analisis *cost and benefit* pada periode Q1 2023 menunjukkan bahwa untuk kasus-kasus dengan nilai barang bukti tergolong kecil, terdapat pertanyaan mengenai rasionalitas dan efektivitas penegakan hukum jika dibandingkan dengan sumber daya, waktu, dan biaya yang dikeluarkan aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang *cyber crime* dan penguatan koordinasi antar instansi. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan kriteria dan standar dalam penentuan prioritas kasus berdasarkan analisis *cost-benefit* untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, UU ITE, Perjudian *Online*, Analisis *Cost and Benefit*, Polda Riau

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI
BERMUATAN PERJUDIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH POLDA RIAU**

(Muhammad Jordy Prammulia, 2320112033, Faculty Of Law, Postgraduate
Program, Andalas University, Master Of Law Science, hlm 105, 2025)

ABSTRACT

Law enforcement against the criminal act of disseminating gambling information has become a serious concern for Indonesian society. Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (the ITE Law) provides a strong legal basis to tackle cybercrime. However, the implementation of law enforcement in the field still faces various challenges and obstacles. This study aims to analyze law enforcement against the crime of disseminating gambling information under the ITE Law by the Riau Regional Police (Polda Riau), along with the challenges faced during the enforcement process. The research also explains and analyzes the cost and benefit calculation of law enforcement against gambling information dissemination, specifically regarding case costs and enforcement results obtained in Q1 2023. The research method used is empirical legal research with a juridical-empirical approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with investigators and related officials at Polda Riau, field observations of the law enforcement process, and case document analysis. Secondary data were collected from legislation, police reports, enforcement statistics, and related literature. Data analysis was conducted descriptively and analytically using triangulation techniques to validate the research findings. The study results show that enforcement of Article 45 paragraph (2) in conjunction with Article 27 paragraph (2) of the ITE Law against gambling information dissemination by Polda Riau has yielded fairly significant results but still faces challenges due to limited human resources with cybercrime expertise, the complexity of technology used by perpetrators, and coordination difficulties with related parties. Cost and benefit analysis for Q1 2023 indicates that for cases involving relatively small evidential value, questions arise about the rationality and effectiveness of law enforcement compared to the resources, time, and costs expended by law enforcement officers. This study recommends optimizing law enforcement through enhancing human resource capacity in cybercrime and strengthening inter-institutional coordination. Furthermore, it suggests developing criteria and standards for prioritizing cases based on cost-benefit analysis to improve enforcement efficiency. Keywords: Law Enforcement, ITE Law, Online Gambling, Cost and Benefit Analysis, Riau Regional Police.